



EVALUASI PROGRAM KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MERAUKE

Sumiasih¹, Aenal Fuad Adam², Nur Jalal³, Syahrudin⁴

¹Mahasiswa Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Musamus, Indonesia

³Magister Administrasi Publik Universitas Musamus, Indonesia

Email: sumiasih@gmail.com¹, adam@unmus.ac.id², nurjalal243@gmail.com³,
syahrudin@unmus.ac.id⁴

Received: 07-02-2025

Accepted: 03-03-2025

Published: 15-03-2025

Abstract

The Community Information Group (KIM) program is a strategic initiative by the Department of Communication and Information Technology of Merauke Regency to encourage active community participation in managing information and communication. This study aims to evaluate the effectiveness of the KIM program's implementation, covering aspects of planning, execution, and its impact on the community. The research method employed is a qualitative approach, with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The evaluation results indicate that the KIM program has positively contributed to improving community information literacy, particularly in rural areas. However, several challenges were identified, such as limited human resources, uneven technological infrastructure, and low community participation in certain activities. Therefore, strategic measures are needed, including enhancing the capacity of KIM members, expanding access to information technology, and optimizing synergy between local government, local communities, and other stakeholders. This study is expected to serve as a reference for developing a more effective and sustainable KIM program in the future.

Keywords: *Community Information Group (KIM), Program Evaluation, Information Literacy*

Abstrak

Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu inisiatif strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan informasi dan komunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program KIM, mencakup aspek perencanaan, implementasi, hingga dampaknya terhadap masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program KIM telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan literasi informasi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Namun, terdapat sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur teknologi yang belum merata, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam beberapa kegiatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan kapasitas anggota KIM, perluasan akses teknologi informasi, serta optimalisasi sinergi antara pemerintah daerah, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pengembangan program KIM yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kata Kunci: *Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Evaluasi Program, Literasi Informasi*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti saat ini, kebutuhan informasi bagi masyarakat sebagai sesuatu yang memang tidak bisa dielakkan, mengingat bahwa kita yang merupakan warga negara harus memiliki hak untuk memperoleh informasi dalam rangka mengembangkan diri dan lingkungan sosialnya sesuai dengan pasal 28 F UUD 1945 yang berbunyi “ *transparansi dan pelancaran arus informasi merupakan prasyarat bagi terciptanya pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel serta perekonomian global menuntut masyarakat berwawasan informasi agar mampu meningkatkan daya saing masyarakat*”. Untuk pemanfaatan potensi sumber daya informasi yang ada ditengah masyarakat, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) digunakan sebagai penyerap aspirasi atau keinginan masyarakat juga untuk sebagai penyebar luas informasi masyarakat, selain itu untuk membangun jaringan informasi dan meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan untuk masyarakat serta pemerataan arus informasi di perkampungan maupun perkotaan. Saat ini Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) telah menyebarluaskan informasi tentang pentingnya akan informasi didalam masyarakat. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) ini digunakan akibat kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) menjadi salah satu peran untuk menjadi fasilitator keterbatasan informasi.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan suatu lembaga yang dibentuk dan berkembang ditengah masyarakat. Pada awal dimaksudkan sebagai penyebarluasan dan pemerataan pesan – pesan pembangunan. Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi yang diterima oleh masyarakat, khususnya dalam menghadapi era informasi dan teknologi yang berkembang pesat. Latar belakang munculnya program ini berawal dari beberapa faktor utama yang meliputi kesenjangan informasi, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi yang akurat dan bermanfaat

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah kelompok yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat yang secara mandiri dan kreatif mengelola informasi untuk pemberdayaan masyarakat. Definisi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berdasarkan peraturan menteri Kominfo nomor 8 tahun 2010 adalah kelompok masyarakat yang aktif mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat secara swadaya. Menurut William N. Dunn dalam bukunya yang berjudul *Public Policy Analysis* (1981) Mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menilai konsekuensi kebijakan yang telah diimplementasikan, guna menentukan apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Evaluasi kebijakan bertujuan untuk memahami efektivitas dan efisiensi suatu kebijakan dengan memberikan umpan balik untuk perbaikan kebijakan selanjutnya. Evaluasi kebijakan menurut Peter H. Rossi, Mark W. Lipsey,

dan Howard E. Freeman Dalam buku *Evaluation: A Systematic Approach* (2004), Rossi, Lipsey, dan Freeman menjelaskan evaluasi kebijakan sebagai suatu penilaian yang dilakukan terhadap tujuan dan dampak kebijakan publik, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang sejauh mana kebijakan tersebut berhasil mencapai tujuannya, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Mereka menekankan pentingnya pendekatan yang berbasis data dalam evaluasi kebijakan.

Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Indonesia memiliki landasan hukum yang mengatur operasional dan prinsip-prinsipnya. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum bagi aktivitas KIM antara lain Berdasarkan pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 08/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, pemerintah dan masyarakat desa mulai membentuk kelompok untuk mengatasi permasalahan kesenjangan 5 ketersediaan informasi dan sebagai upaya menghimpun individu untuk berkomunikasi dalam rangka memberdayakan masyarakat desa. Mengacu pada Peraturan Menteri tersebut munculah Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat, dan untuk masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktivitasnya adalah melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah, sebagaimana yang tercantum pada pasal 1 ayat (2) dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 72 Tahun 2023 tentang kelompok informasi masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke.

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui akses dan penyebaran informasi yang relevan dan bermanfaat, Pemberdayaan Masyarakat dalam Literasi Informasi dan Teknologi, Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembangunan, Memperkuat Komunikasi antara Pemerintah dan Masyarakat. Program ini membantu masyarakat untuk lebih cerdas dalam mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi yang ada, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah, layanan publik, maupun isu-isu sosial lainnya. Kelompok Informasi Masyarakat KIM di bawah naungan Diskominfo memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi informasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Meskipun program ini memiliki tujuan yang mulia, ada beberapa permasalahan yang seringkali muncul dalam pelaksanaannya seperti Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Memadai, Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Pendanaan yang Tidak Stabil, Penyebaran Informasi yang Tidak Merata, Tantangan dalam Mengelola Keberagaman Informasi, Keterbatasan Waktu dan Komitmen Masyarakat, Perbedaan Tingkat Pendidikan dan Literasi Teknologi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas, perlu adanya perbaikan dalam aspek pembiayaan, pelatihan, dukungan infrastruktur, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Pemerintah dan pihak terkait perlu bekerja sama dengan organisasi lokal dan masyarakat untuk memastikan bahwa

program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dapat berjalan secara efektif, merata, dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam pemberdayaan masyarakat.

Sejauh ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke samapi dengan saat ini sudah memebentuk 23 (dua puluh tiga) Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang sudah terbentuk di Kabupaten Merauke, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) tersebut yaitu kelompok KIM maju dari Kampung Rahawayu Distrik Ulilin, kelompok KIM Sota Distrik Sota, Kampung Telaga Sari, Kampung Harapan Makmur, Kampung Kurik, Kampung Sumber Mulya, Kampung Jaya Makmur, Kampung Wapeko, Kampung Wonorejo, Kampung Kaliki, Kampung Anumbob, Kampung Sumber Rejeki, Kampung Ivimahad, Kampung Salor Indah, Kampung Candra Jaya, Kampung Yowid, Kampung Dokib, Kampung Wamal, Kampung Woboyo, Kampung Dodalim, Kampung Welbuti, Distrik Semangga dan Distrik Merauke, dari banyaknya kelompok informasi masyarakat (KIM) yang sudah terbentuk sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat dibidang informasi harus ada dan sangat perlu dievaluasi sebagai pertimbangan, kerangka kerja untuk menganalisis, mengukur perbandingan pengelola dan menyusun kejadian-kejadian, selain itu evaluasi juga dilakukan sebagai dasar perencanaan kegiatan dimasa mendatang. Setiap program kerja yang sudah dibuat didalam perusahaan atau organisai seharusnya dapat dievaluasi (dinilai kembali), menurut Cultip dan Center yang dikutip oleh F Rachmadi menyatakan didalam manajemen public relations dan proses – prosesnya. Kegiatan *public relations* dilakukan dengan proses berikut : 1) Penemuan fakta (*fact finding*); 2) Perencanaan (*planning*); 3) Komunikasi (*komunikasion*), dan 4) Evaluasi (*evalusion*).

Penelitian dengan topik evaluasi kelompok informasi masyarakat (KIM) telah dilakukan oleh berbagai peneliti dalam bidang ilmu sosial, komunikasi, dan perilaku. Topik ini berfokus pada bagaimana kelompok atau komunitas mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan informasi dalam masyarakat, serta bagaimana evaluasi terhadap proses dan dampak informasi tersebut dilakukan, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Dr. Miftahul Jannah, 2019) Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan judul “Kelompok Informasi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat di Daerah Terpencil” penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dari penelitian tersebut Penelitian ini menemukan bahwa dengan adanya Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), masyarakat yang sebelumnya terisolasi mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas hidup mereka, mulai dari akses layanan kesehatan yang lebih baik hingga peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang pertanian. Penelitian yang dilakukan Dr. Haryanto, M.Pd. (2018) Universitas Negeri Malang (UM), Malang dengan judul Kelompok Informasi Masyarakat dalam Meningkatkan Akses Pendidikan di Daerah Terpencil di Indonesia “ penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dari penelitian tersebut Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) memainkan peran kunci dalam menghubungkan masyarakat di daerah terpencil dengan sumber daya pendidikan, seperti program beasiswa dan pelatihan

keterampilan. Program ini juga membantu masyarakat yang tidak memiliki akses langsung ke fasilitas pendidikan untuk memperoleh informasi dan kesempatan pendidikan yang lebih baik

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan memberikan gambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan ini didasarkan pada filsafat konstruktivisme, di mana kenyataan dianggap sebagai pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu, dan peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Penelitian dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Merauke, yang dipilih karena Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berhubungan langsung dengan masyarakat dan bertujuan meningkatkan kualitas informasi yang diterima. Informan penelitian ini terdiri dari 8 orang, termasuk Kepala Dinas Kominfo, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi, serta Ketua KIM di tingkat distrik dan kampung. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder yang diperoleh dari arsip, dokumen, dan laporan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi langsung, wawancara tatap muka, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan tahap pengumpulan, reduksi, penyajian, dan kesimpulan atau verifikasi sesuai dengan prosedur yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektifitas

Program KIM dinilai cukup efektif dalam menyampaikan informasi publik kepada masyarakat, khususnya terkait kebijakan pemerintah dan layanan publik. Informan mengungkapkan bahwa program ini berhasil meningkatkan literasi informasi masyarakat, meskipun ada tantangan seperti keterbatasan infrastruktur komunikasi, kurangnya pelatihan anggota KIM, dan anggaran terbatas. Beberapa solusi yang diajukan antara lain peningkatan kapasitas anggota KIM, alokasi anggaran yang lebih besar, dan kerja sama dengan pihak swasta untuk mendukung infrastruktur. Secara umum, para informan menekankan perlunya peningkatan koordinasi, pelatihan berkelanjutan, serta perbaikan infrastruktur komunikasi, terutama di daerah terpencil. Program ini diharapkan terus berkembang dengan fokus pada peningkatan aksesibilitas informasi melalui teknologi dan dukungan lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan.

Efektivitas sebuah program mengukur sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan tercapai. Dalam konteks KIM, efektivitas diukur berdasarkan kemampuan program untuk menyampaikan informasi publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berdasarkan wawancara dengan berbagai informan, dapat dilihat bahwa sebagian besar menilai program ini efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dan program

sosial, seperti bantuan sosial dan layanan administrasi kependudukan. Pendapat Para Pemangku Kepentingan menyebutkan bahwa KIM berhasil meningkatkan literasi informasi masyarakat dan pemahaman mereka terhadap program-program pemerintah. Bahwa program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dan program sosial, meskipun tantangan tetap ada. Meskipun KIM efektif dalam penyebaran informasi digital, tantangan keterbatasan teknologi di daerah tertentu perlu diperhatikan.

Teori komunikasi massa, seperti yang diajukan oleh Shannon & Weaver (1949), mengidentifikasi efektivitas komunikasi bergantung pada kemudahan penerima pesan untuk memahami informasi yang disampaikan. Dalam konteks ini, KIM telah berhasil menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan menggunakan berbagai saluran, baik melalui media sosial maupun aplikasi pesan. Teori Partisipasi Masyarakat yang dikembangkan oleh Arnstein (1969) juga menggarisbawahi pentingnya partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, program KIM mendukung partisipasi masyarakat dengan memberikan akses informasi yang lebih luas, yang berdampak pada kesadaran akan hak dan kewajiban mereka dalam pembangunan.

Namun, keterbatasan infrastruktur komunikasi di wilayah terpencil, yang dikeluhkan oleh para Ketua KIM, merujuk pada Teori Akses Digital yang menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendukung distribusi informasi secara merata. Hernández et al (2016) menyatakan bahwa akses terhadap teknologi informasi yang terbatas dapat menghambat distribusi informasi yang efektif, sehingga meningkatkan kesenjangan informasi antara masyarakat di daerah perkotaan dan pedesaan.

2. Efisiensi

Efisiensi program KIM di Kabupaten Merauke masih menghadapi tantangan terkait pengelolaan sumber daya yang ada. Meskipun pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial dan aplikasi pesan dianggap cukup efisien, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia mengurangi efektivitas program. Pemborosan dalam pengeluaran, seperti penggunaan sarana komunikasi yang kurang optimal, dapat diminimalkan dengan pengelolaan anggaran yang lebih terfokus dan pemanfaatan teknologi secara maksimal. Solusi yang disarankan meliputi peningkatan pelatihan anggota KIM, pengoptimalan alokasi anggaran, serta peningkatan koordinasi antarinstansi dan dengan mitra lokal untuk meningkatkan efisiensi program. Selain itu, beberapa ketua KIM di tingkat distrik dan kampung juga menyatakan bahwa terbatasnya anggaran operasional menjadi hambatan utama, sehingga diperlukan peningkatan alokasi dana dan sinergi dengan pemerintah serta pihak terkait untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Efisiensi mengukur sejauh mana sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal dalam mencapai tujuan program. Menurut wawancara dengan berbagai informan, program KIM di Kabupaten

Merauke telah menunjukkan upaya efisiensi meskipun masih ada ruang untuk perbaikan, terutama terkait keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.

Pendapat Para Pemangku Kepentingan menekankan pentingnya perencanaan anggaran yang lebih fokus dan pengelolaan anggaran yang efisien untuk mengurangi pemborosan. Penggunaan teknologi secara optimal untuk mengurangi biaya operasional. Keterbatasan anggaran operasional menjadi kendala utama dalam meningkatkan efisiensi di lapangan, yang menghambat kegiatan seperti sosialisasi dan pengadaan sarana pendukung.

Teori Efisiensi Sumber Daya yang diusulkan oleh Dorfman et al (2004) menyatakan bahwa organisasi harus memanfaatkan sumber daya yang ada dengan bijaksana untuk memaksimalkan hasil. Dalam hal ini, meskipun sumber daya yang tersedia terbatas, para informan menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi dan media sosial telah dilakukan untuk mengoptimalkan komunikasi dan penyebaran informasi dengan biaya yang lebih rendah. Selain itu, teori Pengelolaan Anggaran Publik oleh Wildavsky (1964) menekankan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih fokus dan terencana dapat mengurangi pemborosan dan memastikan sumber daya digunakan secara optimal.

Namun, masalah keterbatasan anggaran yang dikeluhkan oleh banyak informan, seperti di tingkat distrik dan kampung, mengarah pada pentingnya sinergi dengan pihak swasta atau lembaga lain untuk mendukung penyediaan infrastruktur komunikasi yang lebih baik, sebagaimana disarankan oleh Teori Kolaborasi Sumber Daya oleh Pfeffer & Salancik (1978), yang menyatakan bahwa kolaborasi antar instansi atau sektor dapat membantu mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

3. Kecukupan

Program KIM di Kabupaten Merauke belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan informasi masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Informan menyarankan peningkatan anggaran, penambahan tenaga kerja, dan penggunaan teknologi lebih efisien untuk memperbaiki kendala yang ada, seperti pemborosan anggaran dan keterbatasan sarana komunikasi.

Kecukupan dalam konteks Program KIM di Kabupaten Merauke merujuk pada sejauh mana program ini mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, terdapat konsensus bahwa Program KIM telah berhasil menyediakan informasi yang cukup sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Namun, meskipun secara umum program ini berjalan dengan baik, sebagian besar informan menyoroti adanya kekurangan dalam hal kecukupan sumber daya, khususnya dalam hal pelatihan digital, literasi media, serta pengadaan sarana pendukung yang memadai.

Meskipun kapasitas sumber daya yang ada sudah memadai, jumlahnya masih terbatas, terutama dalam menjangkau masyarakat di daerah-daerah terpencil yang memiliki keterbatasan akses terhadap

informasi. Hal ini berhubungan erat dengan terbatasnya anggaran operasional yang menyebabkan pengadaan sarana pendukung, seperti alat komunikasi dan teknologi informasi, menjadi terbatas. Salah satu dampak dari terbatasnya anggaran adalah kesulitan dalam menyediakan perangkat modern yang dibutuhkan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, tidak adanya pelatihan yang cukup dalam hal literasi digital dan penggunaan teknologi informasi menghambat masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan informasi yang disediakan oleh program ini.

Meskipun Program KIM telah berhasil dalam mencapai tujuannya untuk memberikan informasi kepada masyarakat, tantangan terbesar terletak pada kecukupan sumber daya yang dimiliki untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas program dalam jangka panjang. Syamsudin (2009) menerangkan mengenai kecukupan dalam program pembangunan menjelaskan bahwa untuk menjalankan suatu program secara efektif, tidak hanya informasi yang perlu disediakan, tetapi juga adanya sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup anggaran, tenaga kerja, dan fasilitas yang cukup untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik. Jika sumber daya ini terbatas, maka efektivitas dan jangkauan program pun akan berkurang, terutama dalam memastikan bahwa seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses informasi dengan mudah.

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi kecukupan dalam Program KIM adalah keterbatasan anggaran. Sebagian besar informan menyoroti bahwa anggaran yang tersedia tidak selalu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional program. Sebagai contoh, beberapa kegiatan penting seperti pelatihan masyarakat mengenai penggunaan teknologi dan literasi digital, serta pengadaan peralatan komunikasi yang lebih modern, seringkali terbatas karena keterbatasan dana. Akibatnya, program ini tidak dapat sepenuhnya memenuhi standar yang diharapkan, dan banyak kegiatan penting yang tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Dalam hal ini, teori pengelolaan anggaran oleh McConnell et al (2013) mengungkapkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada ide dan tujuan yang besar, tetapi juga pada bagaimana sumber daya, terutama anggaran, dapat dialokasikan dengan bijak dan efisien. Program KIM perlu melakukan pengelolaan anggaran yang lebih terencana dengan prioritas pada alokasi dana untuk kegiatan yang mendesak, seperti penyediaan alat komunikasi yang lebih efektif dan pelatihan berkelanjutan untuk masyarakat. Peningkatan kualitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi, misalnya dengan memanfaatkan platform digital dan aplikasi yang lebih murah dan mudah diakses.

Selain itu, teori efisiensi program dari Musgrave (1980) juga relevan di sini. Musgrave menyatakan bahwa dalam program publik, efisiensi tidak hanya mengacu pada penggunaan anggaran secara bijaksana, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut dapat mencapai hasil

yang maksimal dengan biaya yang minimal. Dalam konteks KIM, penggunaan teknologi digital yang lebih efisien bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kualitas program tanpa harus mengeluarkan anggaran yang terlalu besar. Sebagai contoh, memanfaatkan aplikasi berbasis web atau ponsel pintar untuk distribusi informasi dapat mengurangi ketergantungan pada media cetak yang lebih mahal, serta memperluas jangkauan program ke wilayah yang lebih terpencil.

Keterbatasan pelatihan digital dan literasi media juga menjadi masalah utama dalam kecukupan Program KIM. Meskipun sebagian besar masyarakat sudah mulai familiar dengan penggunaan teknologi, banyak yang masih kurang terampil dalam memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi secara efektif. Dalam wawancara, beberapa informan menyebutkan bahwa pelatihan dalam literasi digital sangat dibutuhkan, terutama untuk masyarakat yang berada di daerah terpencil yang tidak memiliki akses mudah ke pelatihan teknologi.

4. Pemerataan

Meskipun program KIM berupaya memberikan informasi yang merata, tantangan geografis dan infrastruktur sering kali membatasi akses, terutama di daerah terpencil. Kolaborasi dengan lembaga lokal dan penggunaan berbagai saluran informasi seperti radio komunitas dan mobile kiosk informasi dilakukan untuk memperluas jangkauan, namun masih ada kelompok yang merasa kurang mendapatkan perhatian.

Program KIM di Kabupaten Merauke bertujuan untuk meratakan distribusi informasi ke seluruh lapisan masyarakat, termasuk daerah terpencil. Namun, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, dan akses teknologi menjadi hambatan utama. Meskipun saluran distribusi seperti radio komunitas dan kiosk informasi bergerak membantu, masih ada kelompok yang kurang terjangkau, terutama di daerah sulit dijangkau. Aksesibilitas tetap menjadi masalah, dengan banyak wilayah yang belum memiliki jaringan komunikasi yang memadai dan masyarakat yang kesulitan mengakses teknologi digital.

Soekanto (2011) menyatakan bahwa pemerataan informasi tidak hanya soal distribusi fisik, tetapi juga sejauh mana masyarakat bisa mengaksesnya. Oleh karena itu, solusi untuk pemerataan informasi adalah memperkuat saluran distribusi dan memanfaatkan teknologi berbasis data yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Teknologi informasi yang lebih sederhana, seperti aplikasi ponsel pintar, bisa membantu mengatasi hambatan geografis dan meningkatkan akses.

Namun, tantangan utama adalah rendahnya literasi digital di daerah terpencil. Program KIM harus fokus tidak hanya pada distribusi informasi, tetapi juga pelatihan literasi digital agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi dengan efektif. Teori akses informasi dari Tufekci (2014) menyebutkan bahwa hambatan teknis dan sosial sering menghalangi akses informasi, sehingga pendekatan inklusif dan pelatihan teknologi menjadi kunci untuk mengatasi kesenjangan ini.

5. Responsifitas

Program KIM cukup responsif terhadap kebutuhan informasi masyarakat dengan memperbarui konten secara cepat dan menanggapi umpan balik melalui saluran digital. Meskipun demikian, penguatan komunikasi dua arah dan kolaborasi antarinstansi lebih lanjut disarankan agar masalah dapat lebih cepat diidentifikasi dan ditangani.

Responsivitas Program KIM di Kabupaten Merauke, berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai informan, menunjukkan bahwa program ini sudah cukup efektif dalam merespons kebutuhan informasi masyarakat. Pihak pemerintah, melalui Dinas Kominfo, menunjukkan kemampuan yang baik dalam menanggapi umpan balik dari masyarakat, baik melalui saluran digital, media sosial, maupun pengaduan langsung. Pentingnya penggunaan teknologi digital dan media sosial sebagai saluran untuk menerima dan merespons umpan balik dari masyarakat dengan cepat. Program KIM sudah berusaha memperbarui konten secara berkala dan adaptif terhadap perkembangan sosial dan teknologi, serta mengembangkan kolaborasi antarinstansi guna mempercepat respons terhadap isu yang berkembang.

Namun, terdapat satu usulan dari Ketua KIM Kampung yang menginginkan adanya peningkatan komunikasi dua arah yang lebih interaktif, sehingga kebutuhan masyarakat dapat lebih cepat ditanggapi. Menurut Ketua KIM dan beberapa informan lainnya, komunikasi yang lebih interaktif dan langsung dengan masyarakat akan membantu mempercepat identifikasi masalah dan memfasilitasi penanganan yang lebih efektif. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi dari Shannon dan Weaver (1949) yang menjelaskan pentingnya umpan balik dalam komunikasi. Dalam konteks KIM, umpan balik yang cepat dan tepat dari masyarakat memungkinkan pemerintah merespons kebutuhan informasi secara akurat dan sesuai dengan perkembangan yang ada.

Selain itu, Lasswell (1948) dalam teorinya tentang komunikasi massa juga menekankan bahwa untuk menjadi responsif, informasi harus sampai kepada audiens yang tepat pada waktu yang tepat dan dalam format yang sesuai. Dalam hal ini, penggunaan media sosial dan teknologi digital menjadi faktor penting untuk menjamin bahwa informasi dapat disampaikan secara cepat dan tepat, serta mempercepat aliran informasi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Program KIM sudah cukup responsif, peningkatan komunikasi dua arah dan penggunaan saluran yang lebih interaktif, seperti aplikasi pengaduan atau forum diskusi digital, dapat lebih meningkatkan efektivitas responsivitas program.

6. Ketepatan

Program KIM dianggap tepat sasaran karena melibatkan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi, terutama di daerah dengan keterbatasan teknologi. Evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Program KIM di Kabupaten Merauke dinilai tepat sasaran, dengan menyorot kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam

menyebarkan informasi, terutama di daerah dengan keterbatasan akses teknologi. Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa program ini telah mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang dapat berfungsi sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat. Kelompok-kelompok ini dianggap efektif dalam menyebarkan informasi, terutama di daerah terpencil di mana akses terhadap teknologi terbatas.

Teori Diffusion of Innovations oleh Everett Rogers (2003) menjelaskan bahwa adopsi inovasi (dalam hal ini informasi) sangat dipengaruhi oleh individu atau kelompok yang berperan sebagai agen perubahan dalam komunitas. Dalam konteks KIM, kelompok masyarakat yang menjadi agen penyebar informasi ini memiliki pengaruh besar dalam memfasilitasi penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa KIM telah berhasil mengidentifikasi dan melibatkan kelompok-kelompok strategis yang dapat membantu menyebarkan informasi secara efektif dan efisien, meskipun ada keterbatasan akses teknologi.

Selain itu, teori Social Capital dari Robert Putnam (2000) mengungkapkan bahwa kepercayaan dan keterlibatan sosial dalam komunitas dapat memperkuat kemampuan untuk mengakses dan mendistribusikan informasi. Dalam konteks ini, Ketua KIM di kampung-kampung yang terlibat dalam Program KIM memainkan peran kunci dalam memastikan informasi yang relevan dan tepat disampaikan kepada masyarakat. Keberadaan mereka yang memiliki kedekatan dengan masyarakat lokal membuat penyampaian informasi lebih efektif, karena mereka memahami konteks dan kebutuhan lokal yang lebih mendalam.

Namun, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Christopher Paul (2011) dalam bukunya "*Strategic Communication*", menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan untuk menilai efektivitas komunikasi. Program KIM perlu secara periodik mengevaluasi relevansi konten yang disampaikan, agar selalu sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat. Meskipun telah tepat sasaran dalam menysasar kelompok-kelompok strategis, keberlanjutan dan kesesuaian informasi dengan konteks lokal perlu selalu diperhatikan agar komunikasi tetap efektif.

KESIMPULAN

Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Kabupaten Merauke telah terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kebijakan pemerintah dan program sosial, meskipun menghadapi tantangan keterbatasan infrastruktur dan teknologi di beberapa daerah terpencil. Meskipun upaya efisiensi telah dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya terbatas, keterbatasan anggaran dan pelatihan masih menjadi kendala utama dalam mencapainya. Program ini telah memenuhi kebutuhan informasi dasar masyarakat, namun masih perlu meningkatkan pemerataan distribusi informasi, terutama di daerah yang akses teknologinya terbatas.

Responsivitas program terhadap kebutuhan informasi masyarakat sudah cukup baik, namun peningkatan komunikasi dua arah dan penggunaan saluran yang lebih interaktif diperlukan untuk efektivitas yang lebih besar. Selain itu, ketepatan program dalam menargetkan kelompok masyarakat strategis yang berperan sebagai penyebar informasi sangat penting, meskipun tetap memerlukan evaluasi dan penyesuaian konten agar tetap relevan dengan kebutuhan lokal. Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuannya meskipun tantangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinaldi, F., Zhang, H., Liu, Z., Hernandez, A. (2016). Loss and benefit caused by a diesel engine: from the perspective of human health. *Journal of Industrial Ecology*.
- Alkin, M. C., & Taut, S. (2013). *Evaluating the role of participatory evaluation in organizational development*. *American Journal of Evaluation*, 34(3), 314-332.
- Arnstein SR. 1969. A Leader of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, Volume 35 (4).
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring* (Edisi ke-5).
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (1979). *Quasi-experimentation: Design & analysis issues for field settings*. Houghton Mifflin.
- Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- Havelock, R. F. (1971). *Planning for innovation through dissemination and utilization of research*. Center for Research on Utilization of Scientific Knowledge, Michigan State University
- House, R. J., Hanges, P. J., Javidan, M., Dorfman, P. W., & Gupta, V. (2004). *Culture, leadership, and organizations: The GLOBE study of 62 societies*. Sage Publications.
- lkin, M. C., & Taut, S. (2003). *Participatory evaluation in Handbook of practical program evaluation*. Jossey-Bass.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara..
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara
- Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi*. Sekretariat Negara
- Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara
- Indonesia. (2016). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembangunan Sumber Daya Manusia di Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)*. Sekretariat Negara.

- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Sekretariat Negara.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2010 tentang Kelompok Informasi Masyarakat*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Kelompok Informasi*. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia
- Kirkpatrick, D. L. (1994). *Evaluating training programs: The four levels*. 2nd ed. Berrett-Koehler Publishers.
- Korten, D. C. (1990). *Getting to the 21st century: Voluntary action and the global agenda*. W.W. Norton & Company.
- Korten, D. C. (2006). *The post-corporate world: Life after capitalism*. Kumarian Press
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2009). *Marketing management* (13th ed.). Pearson Education
- Lasswell H. 1948. "The Structure Function of Communication in Society", *The Communication of Ideas*. Institute for Religious and Social Studies. New York
- McConnell, C. R., Brue, S. L., & Machpherson, D. A. 2013. *Contemporary Labor Economics Tenth Edition*. In *Employment and Unemployment* (p. 538). New York: The McGraw-Hill Companies, Inc.
- Musgrave, R. (1980). *Public Finance In Theory and Practice*. London: Mcgrw – Hill Book Company
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Patton, M. Q. (1997). *Utilization-focused evaluation: The new imperative for evaluation*. Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-focused evaluation* (4th ed.). Sage Publications.
- Patton, M. Q. (2010). *Developmental evaluation: Applying complexity concepts to enhance innovation and use*. Guilford Press.
- Parasuraman, A., Valarie, A.Z. dan Leonard, L.B. (1988). *Servqual : a Multiple Item Scale for Measuring Consumer Perceptions of Service Quality*. *Journal of Retailing*. Vol. 64. No. 1
- Pemerintah Kabupaten Merauke. (2023). *Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 72 Tahun 2023 tentang Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)*. Pemerintah Kabupaten Merauke.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. R. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*. Harper and Row
- Putnam Robert D, 2000 "Bowling Alone: The Collapse and Rivival of American Community". New York : Simon and Schuster.
- Ratminto dan Atik S.W. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Riduwan. (2004). *Metode Observasi dan Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.

- Rieger, N. P. C. (1992). *The role of information in rural development: A study on the effectiveness of information dissemination in rural communities*. The International Development Research Centre.
- Rogers, Everett M. 2003. *Diffusion of Innovations*, Fifth Edition 2003, Free Press, New York, p221
- Scriven, M. (1996). *Types of evaluation and types of evaluation approaches*. In D. D. Williams (Ed.), *Handbook of research on teaching* (pp. 492-503). Macmillan
- Shannon, Claude E, and Warren Weaver. 1949. *The Mathematical Theory of Communication*. Urbana: University of Illinois Press
- Stake, R. E. (2004). *Standards-based and responsive evaluation*. In D. M. Stufflebeam, G. F. Madaus, & T. Kellaghan (Eds.), *Evaluation models: Viewpoints on educational and human services evaluation* (pp. 123-140). Kluwer Academic Publishers.
- Stake, R. E. (2006). *Multiple case study analysis*. Guilford Press
- Soekanto, Soerjono, 2011, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Syamsuddin, L. (2009). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafrudin, M. (2008). *Pengantar ilmu komunikasi* (edisi revisi). Rajawali Press.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Tufekci, Z. (2014). Big questions for social media big data: Representativeness, validity and other methodological pitfalls. Eighth International AAAI Conference on Weblogs and Social Media.
- Weiss, C. H. (1972). *Evaluation and decision-making*. In L. E. Metfessel (Ed.), *Evaluation research: Principles and practice* (pp. 287-318). Harper & Row.
- Weiss, C. H. (1998). *Evaluation: Methods for studying programs and policies*. Prentice-Hall.
- Weiss, C. H. (2000). *The nexus of knowledge and action: Evaluation in the policy process*. *Knowledge and Policy*, 13(3), 1-4.
- Wijaya, A.T. (2001). *Memahami Konsep Balanced Scorecard*. Jakarta : Harvarindo.
- Wildavsky, A. (1964). *The Politics of the Budgetary Process*. Boston: Litle, Brown.